



PENGAWASAN KERUMUNAN DINILAI LEMAH

Antisipasi Lonjakan Kasus Perlu Skenario Matang

YOGYA (KR) - Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Skenario matang pun harus disiapkan guna mengantisipasi potensi lonjakan kasus.

Menurut Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, berdasarkan pengalaman selama ini kenaikan kasus berbanding lurus dengan tingkat mobilitas sosial. "Kita semua berharap jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Tetapi antisipasi harus dikedepankan. Terutama dengan menyiapkan skenario dengan matang," tandasnya, Selasa (18/5).

Beberapa skenario yang harus disiapkan tersebut antara lain menyangkut bantuan permukiman bagi pasien isolasi mandiri. Berkaca pada akhir Maret lalu, bantuan permukiman sempat terhenti akibat anggaran sebesar Rp 600 juta sudah terserap 100 persen. Kendati kini sudah digulirkan kembali usai refocusing anggaran, namun jika banyak kasus bermunculan membutuhkan bantuan permukiman yang jauh lebih besar.

Skenario selanjutnya ialah kesiapan shelter jika di Tegalrejo penuh. Sehingga perlu ada pemetaan ruang yang representatif sebagai alternatif Shelter Tegalrejo. "Tetapi skenario yang lebih penting ialah kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan jika terjadi booming. Ini perlu ditekankan karena beberapa negara saat ini terjadi lonjakan kasus usai meningkatnya mobilitas sosial di sana," urai Fokki.

Sementara terkait pengawasan kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga lebaran, menurut Fokki terdapat banyak kelonggaran. Satgas tingkat kota bahkan dinilainya tidak serius dalam menindaklanjuti kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat. Penilaian tersebut ia dasarkan dari berbagai rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dari beberapa kali koordinasi, diketahui keluhan masih kesulitan menerapkan kebijakan larangan mudik untuk diimplementasikan di wilayah. Hal itu dipengaruhi karena sosialisasi SOP mengenai kebijakan tersebut kurang maksimal.

Di samping itu, tidak ada daya dukung personel dan anggaran di tingkat satgas kementerian dan kelurahan dalam melaksanakan tupoksi sebagai Posko Satgas Covid-19 di wilayah. Begitu pula tupoksi Sat Pol PP sebagai pengaman dan penegak proses termasuk membantu melakukan penyekatan tidak didukung anggaran yang memadai. "Belum lagi kegiatan pasar sore yang pengawasannya terkesan sekadar formalitas. Kerumunan selalu terlihat namun seperti dibiarkan," kata Fokki.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi tersebut dirinya merekomendasikan satgas tingkat kota untuk memiliki langkah antisipatif. Jangan sampai langkah dalam memetakan kondisi faktual sehingga terkesan tidak siap ketika terjadi lonjakan kasus.

"Bagaimanapun negara harus mampu hadir. Kita tidak berharap terjadi lonjakan, namun kita pun harus kuat menghadapi berbagai kemungkinan," tandasnya. (Dhd)

Sat Pol PP Kota Yogya melakukan penuntutan dan pengawasan kepada pengunjung di kawasan Tugu Not Kiloneter selama masa libur Lebaran 2021.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005